



PEMERINTAH
KOTA METRO

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS SOSIAL 2025

☎ (0725) 45250

🌐 dinsos.metrokota.go.id.

Jl. Ahmad Yani, Iringmulyo,
Kecamatan Metro Timur,
Kota Metro, Lampung 34124.

Kata Pengantar

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam upaya melaksanakan perubahan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas organisasi, serta pencapaian kinerja yang lebih optimal

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta penutup.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini adalah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan dan mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang terencana, terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan dari setiap program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro pada setiap tahun anggaran.

Metro, 29 September 2025
Kepala Dinas Sosial,

Ac. Yuliwati, S.H.
Penyina Utama Muda
196807031993022001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah	32
2.4. Riview terhadap rancangan awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
3.3. Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro....	49
3.4. Program dan Sub Kegiatan	52
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana kerja Dinas Sosial Kota Metro	64
 BAB V PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mana Secara teknis operasional perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah sesuai dengan bidangnya masing – masing.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan, Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan

kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Metro.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- c. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;

- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
- k. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- m. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- n. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- o. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri:
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4451);

- r. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana;
- s. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- t. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
- u. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan & Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- v. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro tahun 2005-2025.
- w. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021.
- x. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
- y. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
- z. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Metro di tahun 2025-2029 melalui perencanaan kinerja tahunan

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Penulisan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah
- 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro
- 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana kerja Dinas Sosial Kota Metro

BAB V

PENUTUP

Memuat kesimpulan hasil pelaksanaan renja tahun 2025, serta harapan kritik dan saran terhadap penyajian renja untuk perbaikan pelaksanaan Renja tahun selanjutnya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Sosial pada tahun 2024 didukung dengan program/ kegiatan mencakup 7 program dengan 14 kegiatan, secara kumulatif capaian program/ kegiatan (output) rata-rata hampir tercapai 100%. Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adapun capaian program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan. Pada tahun 2023 pencapaian kinerja program tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja “Persentase dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersedia” terealisasi melebihi 100%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan 9 tugas ASN dengan indikator kinerja “Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Sosial” terealisasi 12 bulan (100%).
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas Sosial” terealisasi 12 bulan (100%)

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja "Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas Sosial" terealisasi 12 bulan (100%).

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja "Persentase Pemenuhan Sarana dan 10 Prasarana yang dibutuhkan Dinas Sosial" terealisasi 12 Bulan (100%).

2) Program Pemberdayaan Sosial

Pencapaian kinerja program pemberdayaan sosial adalah Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan realisasi capaian program tahun ini sebesar 100% sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Kegiatan :

a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah terealisasi (100%).

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pencapaian kinerja program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan realisasi capaian program tahun ini sebesar 100% sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu 0%.

Kegiatan:

a) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Pencapaian kinerja kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk

Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan indikator kinerja “Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan” terealisasi 0%.

4) Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS yang Mandiri dengan realisasi capaian program tahun ini sebesar 100% sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Kegiatan:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Pencapaian kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan indikator kinerja “Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial” terealisasi 100%.

- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pencapaian kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan indikator kinerja “Persentase rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” terealisasi 100%.

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian kinerja program perlindungan dan jaminan sosial adalah “Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial” dengan realisasi 100%.

Kegiatan:

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah” dengan realisasi 100%.

6) Program Penanganan Bencana

Pencapaian kinerja kegiatan Program Penanganan Bencana adalah “Persentase Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial” dengan realisasi 100%.

Kegiatan:

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Pencapaian kinerja kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial” dengan realisasi 100%.

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pencapaian kinerja kegiatan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah “Persentase kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan” dengan realisasi 100%.

Kegiatan:

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase Terpeliharanya TMP” dengan realisasi 100%.

No	Program/Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja	100%	100%	100%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase mengkatkann kapasitas potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah	100%	100%	100%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitas Sosial yang ditangani	100%	100%	100%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100%	100%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Kebutuhan Taman Makan Pahlawan	100%	100%	100%

a. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

1. Kerja sama yang baik dan kekompakan tim internal Dinas Sosial Kota Metro, baik internal bidang maupun antar bidang
2. Komitmen pimpinan dan seluruh aspek lingkup Dinas Sosial Kota Metro terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan
3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang mengacu pada Program Kegiatan dan menyesuaikan pada kondisi daerah.

b. Implikasi yang timbul

1. Dengan adanya capaian Program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan dianggarkan, sehingga tata kelola Pemerintah yang baik bisa tercapai.

c. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat fungsional maupun eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Metro

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

KODE REKENING	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		500	200	100	277	277%	100%		0%
1 . 06 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		500	200	100	279	279%	100%		0%

	Kabupaten/Kota									
1 . 06 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		500	200	100	272	272%	100%		0%
1 . 06 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	10	4	2	6	300%	2		0%
1. 06. 01. 2. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2	1	3	300%	1		0%
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2	1	3	300%	1		0%
1 . 06 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		500	200	100	308	308%	100%		0%
1 . 06 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan	60	24	12	36	300%	12		0%

		gaji dan tunjangan								
1 . 06 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	60	24	12	36	300%	12		0%
1 . 06 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	55	22	11	32	291%	12		0%
1 . 06 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	5	2	1	3	300%	1		0%
1 . 06 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun	10	4	2	6	300%	2		0%
1 . 06 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	100	40	20	20	100%	20		0%
1 . 06 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	6	3	3	100%	6		0%

1 . 06 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	425	170	85	85	100%	85		0%
1 . 06 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	60	24	12	12	100%	12		0%
1 . 06 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah	40	16	8	8	100%	12		0%
1 . 06 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	135	34	17	17	100%	17		0%
1 . 06 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	1.500	600	350	350	100%	350		0%
1 . 06 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	60	24	12	12	100%	12		0%

1 . 06 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	60	24	12	12	100%	12		0%
1 . 06 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	35	16	8	8	100%	8		0%
1 . 06 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai	5	2	1	1	100%	2		0%
1 . 06 . 02	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu	100	200	100	100	100%	100%		0%

		Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								
1 . 06 . 02 . 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya izin dalam pengelolaan undian berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 02 . 2.02 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	500	200	100	100	100%	100		0%
1 . 06 . 02 . 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 02 . 2.03 . 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas	150	60	30	30	100%	12		0%

1 . 06 . 02 . 2.03 . 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	25	10	5	5	100%	12		0%
1 . 06 . 02 . 2.03 . 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Disabilitas terlantar yang memperoleh baantuan	135	78	27	27	100%	100		0%
1 . 06 . 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	200	100	-	0%	3		0%
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	15	6	3	-	0%	3		0%
1 . 06 . 04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan	100	200	100	100	100%	100		0%

		Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial								
1 . 06 . 04 . 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	500	200	100	100	100%	100		0%
1 . 06 . 04 . 2.01 . 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	300	120	60	60	100%	60		0%

1 . 06 . 04 . 2.01 . 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	675	170	135	100	74%	135		0%
1 . 06 . 04 . 2.01 . 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	55	22	11	11	100%	11		0%
1 . 06 . 04 . 2.01 . 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritua dan Sosial	50	20	10	10	100%	10		0%
1 . 06 . 04 . 2.01 . 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilita; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite	50	20	30	26	87%	30		0%

		penhyandang disabilitas								
1 . 06 . 04 . 2.01 . 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan	21.750	8700	4.350	4.350	100%			0%
1 . 06 . 04 . 2.01 . 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan kedaruratan	350	140	70	70	100%	70		0%
1 . 06 . 04 . 2.01 . 12	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah anak yang menerima layanan rujukan	350	140	70	70	100%	70		0%
1 . 06 . 04 . 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase ehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	500	200	100	100	100%	100		0%
1 . 06 . 04 . 2.02 . 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Sistem Layanan Rujukan Terpadu(SLRT), Jumlah masyarakat yang menerima layanan	250	10	37	37	100%	37		0%

1 . 06 . 04 . 2.02 . 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI			3000	3000	100%	2		#DIV/0!
1 . 06 . 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 05 . 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 05 . 2.02 . 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata	46.025	18410	9.205	9.205	100%	12		0%
1 . 06 . 05 . 2.02 . 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	46.025	18410	9.205	9.205	100%	12		0%
1 . 06 . 05 . 2.02 . 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	terlaksana bansos pangan sembako dengan baik	40.000	16000	8000	8000	100%	8000		0%
1 . 06 . 05 . 2.02 . 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	kondisi ekonomi masyarakat berkembang	150	60	30	30	100%	30		0%
1 . 06 . 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Bantuan Bencana	100	200	100	100	100%	100%		0%

		Alam dan Bencana Sosial								
1 . 06 . 06 . 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 06 . 2.01 . 01	Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	5.375	2150	75	47	63%	75		0%
1 . 06 . 06 . 2.01 . 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	25	50	25	25	100%	25		0%
1 . 06 . 06 . 2.01 . 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	350	140	70	70	100%	70		0%
1 . 06 . 06 . 2.01 . 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	115	63	23	23	100%	23		0%

		Kabupaten/Kota								
1 . 06 . 06 . 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 06 . 2.02 . 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	150	60	30	30	100%	30		0%
1 . 06 . 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 07 . 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP	500	200	100	100	100%	100%		0%
1 . 06 . 07 . 2.01 . 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpeliharanya dan tertatanya TMP kemala nusantara	5	2	1	1	100%	1		0%

1. 06. 07. 2. 01. 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Peringatan hari-hari besar dan Talik Asih kepada para pejuang, warakawuri TNI & Polri	5	2	1	1	100%	1		0%
----------------------	---	--	---	---	---	---	------	---	--	----

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Sosial dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang telah ditetapkan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Metro didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis meliputi :

1. Cakupan layanan Rehabilitasi sosial dengan cara meningkatkan layanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas;
2. Cakupan layanan Pemberdayaan sosial dengan cara meningkatkan layanan pemberdayaan sosial terhadap Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan, meningkatkan layanan sosial dan pemberdayaan terhadap perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang, Penerbitan rekomendasi Surat Tanda Daftar LKS, Akreditasi LKSA, Undian Gratis Berhadiah, dan pengumpulan uang/barang;
3. Cakupan layanan Perlindungan dan jaminan sosial dengan cara meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana yang (direkonsiliasi) selama masa tanggap darurat, meningkatkan Tagana yang berkapasitas dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana, meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan upaya perlindungan bagi kepesertaan PKH, JKN dan program linsos lainnya;
4. Cakupan layanan Kemiskinan dengan cara meningkatkan pengolahan dan verval data PPKS dan PSKS, meningkatkan pengelolaan dan verval data kemiskinan dan program perlindungan Sosial lainnya agar masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meningkatkan layanan kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga miskin, meningkatkan layanan keluarga miskin untuk mengakses bantuan UEP/KUBE.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain pelayanan yang diberikan sesuai dengan kegiatan Perangkat Daerah, pada Dinas Sosial juga memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dengan memperhatikan Standar Pelayanan Publik yang tersusun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya :

1. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu BPJS PBI.
2. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar
3. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Pelayanan Rekomendasi bagi Lanjut Usia Terlantar ke Panti Jompo
5. Pelayanan Pemberian Bantuan Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Metro

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025(tnn n)	Tahun 2026(thn n+1)	Tahun 2023(thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025(tnn n)	Tahun 2026(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Rehabilitas sosial dasar anak terlantar diluar panti.	Persentase Rehabilitas sosial dasar anak terlantar diluar panti.	Persentase Rehabilitas sosial dasar anak terlantar diluar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti.	Persentase Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti.	Persentase Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Rehabilitas sosial dasar tuna sosial	Persentase Rehabilitas sosial dasar tuna sosial	Persentase Rehabilitas sosial dasar tuna sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	hususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.	hususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.	hususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.									
4	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana.	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana.	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Capaian kinerja ditinjau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Metro sebagai berikut : Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Metro menunjukkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Metro yaitu “Persentase PPKS yang tertangani” mengindikasikan PPKS yang Tertangani pada Tahun 2024 ini yaitu sebanyak 13.415 Orang atau 95 % dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,5% sehingga persentase capaiannya lebih dari 100%. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yaitu “Persentase PPKS yang tertangani” pada tahun 2024 terealisasi sebesar 95 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,5, hal tersebut menunjukkan realisasi capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Berikut tabel pengukuran kinerja IKU Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisas	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	% Capaian Thd. Target Akhir Renstra
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD							
1	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	94,5%	95%	100%	100%	100%

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Metro memiliki Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Isu-isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi indicator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Metro dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis yang memerlukan kajian khusus agar kendala tersebut tidak menjadi permasalahan yang semakin kompleks.
2. Terbatasnya Anggaran, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam hal Percepatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sesuai dengan target capaian dan penerima layanan yang tepat sasaran. Program percepatan penanganan PPKS, selama ini dinilai masih belum adanya sinergisitas dan koordinasi serta kebersamaan dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini baik dari pemerintah melalui SKPD dan lembaga bentukan pemerintah terkait, pihak swasta maupun masyarakat secara luas
3. Tepenuhinya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bertujuan meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam hal ini Dinas Sosial bertujuan Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
4. Belum optimalnya anggaran, sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggara kesejahteraan sosial yang mendukung berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
5. Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro cukup tinggi, Kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas masih rendah, Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 Terdapat penambahan 3 Sub kegiatan yaitu : sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Pengadaan Mebel hal ini sesuai dengan amanat Permendagri 90.1.15.5-1317 Tahun 2024

Review terhadap rancangan RKPD dengan analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel T-C.31 (Terlampir)

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Pemerintah Kota Metro

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100 %	3.712.588.029	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100 %	3.698.450.459
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10.158.050	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	12.290.700
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.629.350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.696.350
	1	06s	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3.519.350	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3.519.350
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	4 Dokumen	3.009.350	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	4 Dokumen	3.075.000

							RKA-SKPD						RKA-SKPD		
	1	06	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.063.639.86 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.024.815.44 1
	1	06	01	2.0 2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bu lan	2.587.562.66 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bul an	2.610.605.44 1
	1	06	01	2.0 2	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Dokumen	394.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Dokumen	333.200.000
	1	06	01	2.0 2	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen	69.760.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen	62.730.000
	1	06	01	2.0 2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	692.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	4.230.000
	1	06	01	2.0 2	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	
	1	06	01	2.0 2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	3 Laporan	11.224.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	3 Laporan	14.050.000

							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	1	06	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase SDM Pelatihan/bimtek yang memiliki sertifikat	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase SDM Pelatihan/bimtek yang memiliki sertifikat	-	
	1	06	01	2.0 5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	
	1	06	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	265.416.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	286.971.150
	1	06	01	2.0 6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	9.175.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	9.175.000
	1	06	01	2.0 6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	36.024.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	75.824.000
	1	06	01	2.0 6	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	83.970.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	83.970.150
	1	06	01	2.0 6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.753.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.897.000

1	06	01	2.0 6	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen	22.872.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen	22.872.000
1	06	01	2.0 6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	92.622.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	72.233.000
1	06	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pengadaan milik daerah Perangkat Daerah	100 %		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pengadaan milik daerah Perangkat Daerah	100 %	
1	06	01	2.0 7	0005	Pengadaan Mebel	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		Pengadaan Mebel	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	
1	06	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengadaan meubel Perangkat Daerah	100 %	63.343.168	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengadaan meubel Perangkat Daerah	100 %	64.343.168
1	06	01	2.0 8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	4.500.000
1	06	01	2.0 8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.843.168	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.843.168
1	06	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	310.030.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	310.030.000

	1	06	01	2.0 9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	188.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	188.510.000
	1	06	01	2.0 9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	21.520.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	21.520.000
	1	06	01	2.0 9	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersertifikasinya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100 %	615.686.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersertifikasinya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100 %	714.619.150
	1	06	02	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	100 %	75.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	100 %	714.619.150
	1	06	02	2.0 3	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	384 Orang	235.594.500	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	384 Orang	269.923.550
	1	06	02	2.0 3	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	40.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	40.980.000

							Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1	06	02	2.0 3	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	340.092.400	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	403.715.600
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	3.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	3.000.000
	1	06	03	2.0 1		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.000.000
	1	06	03	2.0 1	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3.000.000

4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	100 %	781.383.050	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	100 %	731.913.150
	1	06	04	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 %	343.826.350	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 %	289.559.150
	1	06	04	2.0 1	0001	Penyediaan Permakanan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	90.419.750	Penyediaan Permakanan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	86.639.750
	1	06	04	2.0 1	0002	Penyediaan Sandang	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	29.999.850	Penyediaan Sandang	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	22.542.850
	1	06	04	2.0 1	0003	Penyediaan Alat Bantu	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	38.740.600	Penyediaan Alat Bantu	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	38.740.600
	1	06	04	2.0 1	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6.580.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6.580.000

	1	06	04	2.0 1	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	53.328.350	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	71.103.350
	1	06	04	2.0 1	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	42.029.400	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	42.029.400
	1	06	04	2.0 1	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	77.524.200	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	17.304.200
	1	06	04	2.0 1	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	5.204.200	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	4.619.000
	1	06	04	2.0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya pendampingan sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan	100 %	437.556.700,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya pendampingan sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan	100 %	442.354.000
	1	06	04	2.0 2	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	75.238.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	75.238.000

	1	06	04	2.0 2	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4431 Orang	120.860.400	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4431 Orang	125.657.70
	1	06	04	2.0 2	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	18 Dokumen	241.458.300	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	18 Dokumen	241.458.300
5	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kepala Keluarga Fakir Miskin penerima program perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin	100 %	255.825.900	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kepala Keluarga Fakir Miskin penerima program perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin	100 %	278.505.900
	1	06	05	2.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan	100 %	255.825.900	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan	100 %	278.505.900
	1	06	05	2.0 2	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50 Orang	34.031.100	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50 Orang	34.031.100
	1	06	05	2.0 2	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	7600 Keluarga	128.821.800	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	7600 Keluarga	128.821.800
	1	06	05	2.0 2	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	250 Keluarga	60.973.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	250 Keluarga	83.653.000

							Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1	06	05	2.0 2	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	32.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	32.000.000
6	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	100 %	62.432.550	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	100 %	57.452.550
	1	06	06	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100 %	62.432.550	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100 %	57.452.550
	1	06	06	2.0 1	0001	Penyediaan Makanan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	62.432.550	Penyediaan Makanan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	57.452.550
7	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpeliharanya Nilai - nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	100 %	50.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpeliharanya Nilai - nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	100 %	50.000.000
	1	06	07	2.0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpeliharanya TMP Kemala Nusantara	100 %	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpeliharanya TMP Kemala Nusantara	100 %	50.000.000

	1	06	07	2.0 1	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	50.000.000
--	---	----	----	----------	------	---	---	---	---------	------------	---	---	---	---------	------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat, rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sejalan dengan keinginan masyarakat, bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hanya sebagian sebagian dari usulan masyarakat namun secara keseluruhan sebenarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menggambarkan keinginan dari masyarakat tersebut.

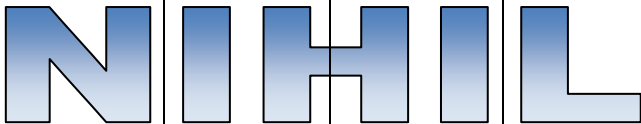
Berdasarkan Berita Acara Hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metro di tingkat Kecamatan pada 5 (lima) Kecamatan di Kota Metro, usulan masyarakat secara khusus yang ditunjuk kepada Dinas Sosial tidak ada. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Metro dapat diasumsikan tidak menemui kendala bagi masyarakat umum, namun demikian Dinas Sosial Kota Metro akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat inovasi-inovasi dalam bidang pelayanan public

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025

Kota Metro

Nama SKPD : Dinas Sosial Kota Metro

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, Dinas Sosial Kota Metro sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Sosial RI dalam RPJPN 2025-2045 yaitu pada Sasaran Visi 2 Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, Agenda Pembangunan 1 (satu) mewujudkan Transformasi Sosial dan Agenda 5 Memantapkan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan Arah Pembangunan Misi 1 Transformasi Sosial untuk Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi pada keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas nasional di tahun 2024, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi Hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kota Metro melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Pelayanan Dasar tersebut meliputi Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti untuk Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial khususnya gelandangan dan Pengemis serta Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Terdapat 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.

Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); *Emotional Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan *Physical Quotient*, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

2. **Kota Metro Sehat**

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. **Kota Metro Sejahtera**

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. **Kota Metro Berbudaya**

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ,
“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Misi 2** : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. **Misi 3** : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. **Misi 4** : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. **Misi 5** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.
6. Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Metro memiliki suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan **Misi 2 (kedua)** yaitu: "Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.

3.3 Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Metro ialah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Metro.

Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

“ Meningkatkan penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial “

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan **Misi 2 (kedua)** yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial dengan Tujuan Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama

Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENGUKURAN	Target 2024
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS Yang Ditangani x 100% Jumlah PPKS	94,6 %

Dari table diatas dapat di jelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial adalah jumlah PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yang tertangani,yang tujuannya adalah demi Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga hal yang menjadi sasaran IKU yaitu Meningkatkan penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara maxsimal.

Adapun formulasi perhitungan untuk mengukur tingkat capaian dari target yang telah di tetapkan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPKS} = \frac{\text{jumlah PPKS yang di tangani}}{\text{jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Dari formulasi diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui berapakah jumlah PPKS yang ditangani yaitu dengan membandingkan jumlah PPKS yang ditangani dengan jumlah PPKS yang terdata dikalikan 100% sehingga akan diketahui berapakah presentase PPKS yang tertangani.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Metro beserta Indikator Kinerjanya Termuat dalam Tabel berikut:

**Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Metro
Tahun 2021-2026**

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara social										
Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat	Presentase Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Meningkatnya cakupan penanganan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kepmendagri No. 050.5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, validasi dan perubahan nomenklatur perencanaan. Hal ini dilakukan agar sistem perencanaan lebih sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Program dan Kegiatan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 yaitu yang bersifat rutin dan bersifat non rutin (teknis). Adapun Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Rutin
2. Program dan Kegiatan Non Rutin (Teknis)

Kode Rekening	Uraian
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.06.01.2.06	Administrasi Umum
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

	Daerah Kabupaten / Kota
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota
1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota
1.06.04	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.01	Penyediaan permakanan
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan
1.06.04.2.02	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota
1.06.05.2.02.01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan
1.06.07	PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan serta sub kegiatan terhadap rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan **Misi 2 (kedua)** yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial dengan Tujuan Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi Mandiri yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan Sejahtera yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 2) Pencapaian SDGs dan Pengentasan kemiskinan

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015.

Dalam hal pencapaian SDGs dan Pengentasan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan didukung oleh 3 program yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi serta Program Penanganan Bencana.

- 3) Pencapaian NSPK dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. NSPK juga merupakan petunjuk untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Dalam pencapaian SPM diperoleh melalui 3 program yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terkait dengan kegiatan berupa pendataan fakir miskin, pengelolaan data fakir, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, Program Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti serta Program Penanganan Bencana yang terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial selama masa tanggap darurat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- 1) Jumlah program terdiri dari 7 program, 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan
- 2) Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas menjadi sarana dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial yang secara tidak langsung menjadi sarana dalam Pencapaian SDGs dan Pengentasan kemiskinan.
- 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2025 mencapai Rp. 5,247,916,429,00,- yang diharapkan bisa akumulasi melalui DAU pada APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2025. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Metro akibat adanya kebijakan refocusing anggaran, maka tetap diharapkan terdapat alokasi anggaran melalui APBN.

c. Rumusan program dan kegiatan yang ada telah sesuai dengan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada uraian Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C. 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Tahun 2025
Kota Metro**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2024				Catatan Penting	Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/
1					2	3	4	5	6	7	8	5	10
					Dinas Sosial								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.533.941.209				5.411.560.433
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.533.941.209				5.411.560.433
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah		100 %	3.712.588.029			100 %	4.025.061.483
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	12.290.700			100 %	9.995.000
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.696.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2.780.000
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.519.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	3.605.000
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.075.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	3.610.000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3.024.815.441			100 %	3.159.481.053
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang/bulan	2.610.605.441	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang/bulan	2.745.093.053
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Dokumen	333.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Dokumen	338.400.000

1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	62.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	61.032.000
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	4.230.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	3.230.000
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	14.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	11.726.000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-				-	24.910.000
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Paket	24.910.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	286.971.150			100 %	260.896.000
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Paket	9.175.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Paket	14.727.400
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	75.824.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	73.323.500
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Paket	83.970.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Paket	68.379.300
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	22.897.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	25.238.800

1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	22.872.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Dokumen	22.872.000
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Laporan	72.233.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Laporan	56.355.000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan milik daerah Perangkat Daerah		100 %	10.000.000			100 %	54.920.000
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	54.920.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan meubel Perangkat Daerah		100 %	64.343.168			100 %	238.910.430
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Laporan	4.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Laporan	4.580.000
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	59.843.168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	234.330.430
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	310.030.000			100 %	275.949.000
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	188.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	116.139.000
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	21.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32 Unit	17.260.000
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	142.550.000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tersertifikasinya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)		100 %	714.619.150			100 %	560.607.800
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat		100 %	714.619.150			100 %	560.607.800
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384 Orang	269.923.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		384 Orang	278.962.900

1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	40.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	39.814.200
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Lembaga	403.715.60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga	241.830.700
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terlaksananya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	3.000.000,00			100 %	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.000.000			100 %	
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Orang	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	100 %	731.913.150			100 %	558.016.200
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 %	289.559.150			100 %	278.248.200
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110 Orang	86.639.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Orang	104.333.800
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang							
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	22.542.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	35.655.550

1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Orang	38.740.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Orang	40.350.800
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	6.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	3.088.800
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	71.103.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	35.409.900
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	42.029.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	37.328.800
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Orang	17.304.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Orang	18.073.500
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan							
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Orang	4.619.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180 Orang	4.007.050
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya pendampingan sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan	100 %	442.354.000			100 %	279.768.000
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Orang	75.238.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Orang	50.692.400
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4431 Orang	125.657.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4431 Orang	44.147.200

1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	241.458.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Dokumen	184.928.400
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kepala Keluarga Fakir Miskin penerima progam perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin		100 %	278.505.900			100 %	184.862.000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan		100 %	278.505.900			100 %	184.862.000
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	34.031.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	43.675.50
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7600 Keluarga	128.821.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7600 Keluarga	52.659.400
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Keluarga	83.653.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Keluarga	69.192.30
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	32.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	19.334.800
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana		100 %	57.452.550			100 %	66.220.750
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial		100 %	57.452.550			100 %	66.220.750
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	57.452.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang	66.220.750
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpeliharanya Nilai - nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan		100 %	50.000.000			100 %	16.792.200
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP Kemala Nusantara		100 %	50.000.000			100 %	16.792.200

1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Makam	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Makam	16.792.200
JUMLAH									5.533.941.209				5.411.560.433

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Dinas Sosial Kota Metro dalam tahun 2025- 2029 untuk mencapai target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Metro akan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro. Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 ini adalah 26 Jenis PPKS dan 9 Jenis PSKS sebagai berikut:

Tabel 4.1.1

Kelompok Sasaran Program/Kegiatan Dinas Sosial

No.	26 Jenis PPKS	9 Jenis PSKS
1	Anak Balita Terlantar	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
2	Anak Terlantar	Pekerja Sosial Masyarakat
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Pendamping PKH
4	Anak Jalanan	Pendamping Rehabsos
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
7	Anak memerlukan Perlindungan Khusus	Karang Taruna
8	Lanjut Usia Terlantar	Penyuluh Sosial
9	Penyandang Disabilitas	Dunia Usaha
10	Tuna Susila	
11	Gelandangan	
12	Pengemis	
13	Pemulung	
14	Kelompok Minoritas	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	

16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	
18	Korban Trafficking	
19	Korban Tindak Kekerasan	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	
21	Korban Bencana Alam	
22	Korban Bencana Sosial	
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	
24	Fakir Miskin	
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	
26	Komunitas Adat Terpencil	

*Keterangan : * merupakan Jenis PPKS yang ditangani dan PSKS yang dbina oleh Dinas Sosial Kota Metro*

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Metro adalah Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai sasaran tersebut diakomodir melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terkait dengan kegiatan berupa pendataan fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
2. Program Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti serta
3. Program Penanganan Bencana yang terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial selama masa tanggap darurat.

Adapun Rencana Program/kegiatan Dinas Sosial Kota Metro tahun 2025 yang memuat indikator kinerja, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan dana indikatif dan sumber dana yang bersumber dari dana APBD Kota Metro tahun 2025 sesuai dengan pedoman penyusunan renja tahun 2025 yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut : Tabel 4.1.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 T-C. 33 (Terlampir).

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2025																	

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1					
									Sebelum					Sesudah										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
Dinas Sosial																								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp. 5.417.850.533	Rp. 102.794.500				Rp. 5.520.645.033	Rp. 5.248.316.933	Rp. 163.243.500				Rp. 5.411.560.433	Rp. 5.777.052.011,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							Rp. 5.417.850.533	Rp. 102.794.500				Rp. 5.520.645.033	Rp. 5.248.316.933	Rp. 163.243.500				Rp. 5.411.560.433	Rp. 5.777.052.011,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							Rp. 3.886.542.233	Rp. 102.794.500				Rp. 3.989.336.733	Rp. 3.861.817.983	Rp. 163.243.500				Rp. 4.025.061.483	Rp. 3.842.052.011,00
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Rp. 12.723.700					Rp. 12.723.700	Rp. 9.995.000					Rp. 9.995.000	Rp. 11.629.350,00
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 5.575.000					Rp. 5.575.000	Rp. 2.780.000					Rp. 2.780.000	Rp. 3.629.350,00
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 4.139.350					Rp. 4.139.350	Rp. 3.605.000					Rp. 3.605.000	Rp. 4.000.000,00
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 3.009.350					Rp. 3.009.350	Rp. 3.610.000					Rp. 3.610.000	Rp. 4.000.000,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Rp. 3.051.947.653					Rp. 3.051.947.653	Rp. 3.159.481.053					Rp. 3.159.481.053	Rp. 3.071.422.661,00
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 2.629.092.703					Rp. 2.629.092.703	Rp. 2.745.093.053					Rp. 2.745.093.053	Rp. 2.587.562.661,00
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 348.000.000					Rp. 348.000.000	Rp. 338.400.000					Rp. 338.400.000	Rp. 394.400.000,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 59.400.000					Rp. 59.400.000	Rp. 61.032.000					Rp. 61.032.000	Rp. 69.760.000,00
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 4.230.000					Rp. 4.230.000	Rp. 3.230.000					Rp. 3.230.000	Rp. 700.000,00
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa																	Rp. 7.000.000,00

1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.224.950				Rp. 11.224.950	Rp. 11.726.000				Rp. 11.726.000	Rp. 12.000.000,00	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 24.910.000				Rp. 24.910.000	Rp. 24.910.000				Rp. 24.910.000	Rp. 50.000.000,00	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.910.000				Rp. 24.910.000	Rp. 24.910.000				Rp. 24.910.000	Rp. 50.000.000,00	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 225.520.450	Rp. 33.674.500			Rp. 259.194.950	Rp. 187.572.500	Rp. 73.323.500				Rp. 260.896.000	Rp. 272.000.000,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.997.000				Rp. 17.997.000	Rp. 14.727.400				Rp. 14.727.400	Rp. 10.000.000,00	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.500.000	Rp. 33.674.500			Rp. 57.174.500	Rp. 0	Rp. 73.323.500			Rp. 73.323.500	Rp. 26.000.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 73.138.850				Rp. 73.138.850	Rp. 68.379.300				Rp. 68.379.300	Rp. 90.000.000,00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.361.600				Rp. 26.361.600	Rp. 25.238.800				Rp. 25.238.800	Rp. 22.000.000,00	

1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.872.000				Rp. 22.872.000	Rp. 22.872.000				Rp. 22.872.000	Rp. 24.000.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 61.651.000				Rp. 61.651.000	Rp. 56.355.000				Rp. 56.355.000	Rp. 100.000.000,00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 34.120.000				Rp. 34.120.000		Rp. 54.920.000			Rp. 54.920.000	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.120.000				Rp. 34.120.000		Rp. 54.920.000			Rp. 54.920.000	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 238.910.430				Rp. 238.910.430	Rp. 238.910.430				Rp. 238.910.430	Rp. 64.000.000,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.580.000				Rp. 4.580.000	Rp. 4.580.000				Rp. 4.580.000	Rp. 4.000.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 234.330.430				Rp. 234.330.430	Rp. 234.330.430				Rp. 234.330.430	Rp. 60.000.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 332.530.000	Rp. 35.000.000			Rp. 367.530.000	Rp. 240.949.000	Rp. 35.000.000			Rp. 275.949.000	Rp. 323.000.000,00
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 166.780.000				Rp. 166.780.000	Rp. 116.139.000				Rp. 116.139.000	Rp. 200.000.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.520.000				Rp. 21.520.000	Rp. 17.260.000				Rp. 17.260.000	Rp. 23.000.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 144.230.000	Rp. 35.000.000			Rp. 179.230.000	Rp. 107.550.000	Rp. 35.000.000			Rp. 142.550.000	Rp. 100.000.000,00

1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp. 601.408.200				Rp. 601.408.200	Rp. 560.607.800				Rp. 560.607.800	Rp. 630.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 601.408.200				Rp. 601.408.200	Rp. 560.607.800				Rp. 560.607.800	Rp. 630.000.000,00
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 218.607.900				Rp. 218.607.900	Rp. 278.962.900				Rp. 278.962.900	Rp. 240.000.000,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.814.200				Rp. 39.814.200	Rp. 39.814.200				Rp. 39.814.200	Rp. 40.000.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 342.986.100				Rp. 342.986.100	Rp. 241.830.700				Rp. 241.830.700	Rp. 350.000.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														Rp. 3.000.000,00
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														Rp. 3.000.000,00
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 3.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp. 639.003.500				Rp. 639.003.500	Rp. 558.016.200				Rp. 558.016.200	Rp. 827.000.000,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Rp. 294.320.500				Rp. 294.320.500	Rp. 278.248.200				Rp. 278.248.200	Rp. 367.000.000,00
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 93.099.000				Rp. 93.099.000	Rp. 104.333.800				Rp. 104.333.800	Rp. 100.000.000,00

1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.855.550				Rp. 37.855.550	Rp. 35.655.550				Rp. 35.655.550	Rp. 30.000.000,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.230.000				Rp. 43.230.000	Rp. 40.350.800				Rp. 40.350.800	Rp. 40.000.000,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.686.800				Rp. 6.686.800	Rp. 3.088.800				Rp. 3.088.800	Rp. 7.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.405.700				Rp. 48.405.700	Rp. 35.409.900				Rp. 35.409.900	Rp. 60.000.000,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 41.772.200				Rp. 41.772.200	Rp. 37.328.800				Rp. 37.328.800	Rp. 45.000.000,00
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.264.200				Rp. 19.264.200	Rp. 18.073.500				Rp. 18.073.500	Rp. 80.000.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.007.050				Rp. 4.007.050	Rp. 4.007.050				Rp. 4.007.050	Rp. 5.000.000,00

1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Rp. 344.683.000				Rp. 344.683.000	Rp. 279.768.000				Rp. 279.768.000	Rp. 460.000.000,00
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 63.007.400				Rp. 63.007.400	Rp. 50.692.400				Rp. 50.692.400	Rp. 80.000.000,00
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.747.200				Rp. 49.747.200	Rp. 44.147.200				Rp. 44.147.200	Rp. 130.000.000,00
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 231.928.400				Rp. 231.928.400	Rp. 184.928.400				Rp. 184.928.400	Rp. 250.000.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp. 235.211.100				Rp. 235.211.100	Rp. 184.862.000				Rp. 184.862.000	Rp. 270.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 235.211.100				Rp. 235.211.100	Rp. 184.862.000				Rp. 184.862.000	Rp. 270.000.000,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.351.100				Rp. 77.351.100	Rp. 43.675.500				Rp. 43.675.500	Rp. 35.000.000,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 86.290.800				Rp. 86.290.800	Rp. 52.659.400				Rp. 52.659.400	Rp. 130.000.000,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.949.200				Rp. 46.949.200	Rp. 69.192.300				Rp. 69.192.300	Rp. 70.000.000,00
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.620.000				Rp. 24.620.000	Rp. 19.334.800				Rp. 19.334.800	Rp. 35.000.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp. 47.685.550				Rp. 47.685.550	Rp. 66.220.750				Rp. 66.220.750	Rp. 125.000.000,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp. 47.685.550				Rp. 47.685.550	Rp. 66.220.750				Rp. 66.220.750	Rp. 125.000.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.685.550				Rp. 47.685.550	Rp. 66.220.750				Rp. 66.220.750	Rp. 100.000.000,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 0				Rp. 0	Rp. 25.000.000,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp. 7.999.950				Rp. 7.999.950	Rp. 16.792.200				Rp. 16.792.200	Rp. 80.000.000,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp. 7.999.950				Rp. 7.999.950	Rp. 16.792.200				Rp. 16.792.200	Rp. 80.000.000,00
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.999.950				Rp. 7.999.950	Rp. 16.792.200				Rp. 16.792.200	Rp. 80.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1	
					Sebelum					Sesudah						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Jumlah					Rp. 5.417.850.533	Rp. 102.794.500			Rp. 5.520.645.033	Rp. 5.248.316.933	Rp. 163.243.500			Rp. 5.411.560.433	Rp. 5.777.052.011,00	
Knta Melm																

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan(Renja) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perencanaan kerja ini nantinya diimplementasikan dalam aktivitas yang bersifat operasional oleh pengampu masing-masing kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2025 diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian target kinerja. Apabila ketersediaan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja ini, maka perlu dilakukan penyesuaian volume target dan sasaran yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target kinerja.

Dalam bab ini kami perlu sampaikan tentang beberapa hal atau informasi terkait dengan penyusunan Renja tahun 2025 sebagai berikut :

A. Kaidah - kaidah pelaksanaan Renja

Dalam penyusunan Renja tahun 2025 telah sesuai dengan kaidah - kaidah pelaksanaan Renja, yaitu :

1. **Kepatuhan pada Rencana Strategis** : Dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Metro tahun 2025 telah memperhatikan dan sejalan dengan Renstra yang disusun dimana didalam dokumen Renja telah memuat visi misi Kota Metro yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Sosial Kota Metro, serta melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Renstra mengikuti kondisi tahun berjalan.
2. **Keterkaitan dengan Rencana Induk** : Dokumen Renja Dinas Sosial Kota Metro tahun 2025 dalam penyusunannya telah mengacu berdasarkan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah) Kota Metro tahun 2025 dengan mendukung tercapainya target nilai SAKIP dan RB Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik sesuai dengan target capaian nilai SAKIP dan RB tahun berjalan.

3. **Kesesuaian dengan kebijakan dan regulasi** : Dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Metro tahun 2025, Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan berpedoman pada Kepmendagri No-900.1.15.5- 1317 tahun 2023 .

Keterukuran dan dapat di ukur : Dalam penyusunan Dokumen Renja, target dan indikator yang ditetapkan dalam Renja harus dapat diukur sehingga pelaksanaan dan perencanaan dapat dievaluasi dengan jelas.

B. Pelaksanaan Renja tahun 2025

Adapun kesimpulan pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai atau dilaksanakan, dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro pada Tahun 2025. Rencana Kerja juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pembangunan, dan Rencana Kerja juga dapat digunakan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan di Kota Metro.

Metro, 29 September 2025
Kepala Dinas Sosial,

ke Yuliwati, S.H.
Pembina Utama Muda
196807031993022001